

**Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta**



Disusun Oleh :

HUSNI ARIEF LUTFIANSYAH

D0108133

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si (.....)
NIP. 196010091986011001 Ketua

2. Asal Wahyuni Erlin M. S.Sos, MPA (.....)
NIP. 197406012008012016 Sekretaris

(.....)
3. Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002 Penguji

Mengetahui,

Dekan

Prof. Pawito, Ph.D
NIP. 19540805198503 1 002

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)



Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan;

jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan;

tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

(James Thurber)

Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan selalu optimis

dengan itu kesuksesan bisa kita raih

(Penulis)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
kupersembahkan karya ini untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta untuk kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan yang tak pernah berhenti sampai kapanpun.
- ❖ Adikku tersayang yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan serta untuk keceriaan yang selalu menemani hari-hariku
- ❖ Inang's Community untuk keceriaan, kebersamaan dan dukungan disaat suka dan duka
- ❖ Teman-teman dan sahabat-sahabatku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
- ❖ Almamaterku UNS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak di bawah ini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Dra. Sri Yuliani, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
3. Prof. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

commit to user

4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Bambang Wijayani, Bapak Sultan, Bapak Arif, Bapak Rohmadi, selaku informan yang telah banyak memberikan banyak informasi sebagai materi analisis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan AN '08 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga ilmu yang kita dapat bersama-sama di bangku kuliah dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi dan orang lain. Kita semua harus sukses dan berhasil amiin.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini juga masih jauh dari sempurna, maka dengan senang hati akan menerima kritik dan saran atas perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, Agustus 2012

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.....	7
B. Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Implementasi.....	11
C. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).....	28
D. Kerangka Berfikir.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	41
F. Validitas Data.....	41

commit to user

G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
1. Kampung Batik Laweyan.....	46
2. Program IPAL di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan...	51
B. Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.....	53
1. Efektivitas.....	53
2. Efisiensi.....	59
3. Kecukupan.....	68
4. Perataan.....	73
5. Responsivitas.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 : Kriteria Evaluasi (Indikator Evaluasi).....	16
Tabel IV.1 : Estimasi Biaya Operasional IPAL Alternatif 1.....	64
Tabel IV.2 : Estimasi Biaya Operasional IPAL Alternatif II.....	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Berfikir.....	34
Gambar III.1 : Model Analisis Interaktif H.B. Sutopo	43
Gambar IV.1 : Proses Sistem Jaringan Air Limbah Batik dan IPAL Kampung Batik Laweyan.....	52



Pedoman Wawancara

1. Efektivitas

- a. Apakah pelaksanaan program IPAL-Dewats sudah sejalan dengan tujuan dari kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup ?
- b. Apakah IPAL-Dewats yang berada di Kampung Batik Laweyan dapat mengurai atau mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air?
- c. Bagaimana Kondisi air Sungai (di area Kampung Batik Laweyan) sebelum dan sesudah menerapkan sistem IPAL-Dewats?
- d. Apakah IPAL-Dewats mampu mewujudkan daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah di Kampung Batik Laweyan?

2. Efisiensi

- a. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membangun IPAL-Dewats sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
- b. Apakah biaya perawatan yang telah disediakan sudah sesuai dengan standar perawatan IPAL-Dewats?
- c. Berapa waktu yang dibutuhkan agar program IPAL-Dewats berjalan optimal?
- d. Selama kurun waktu yang ada (dari awal pembuatan IPAL-hingga sekarang) pembangunan IPAL apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?

3. Kecukupan

- a. Apa saja manfaat yang ditimbulkan dari adanya program IPAL-Dewats di Kampung Batik Laweyan?
- b. Apa saja perubahan yang muncul setelah adanya IPAL-Dewats di Kampung batik Laweyan?

4. Perataan

- a. Bagaimana pengaruh IPAL-Dewats terhadap kelompok pengusaha dan masyarakat di Kampung Batik Laweyan?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan program IPAL-Dewats?

5. Responsivitas

- a. Bagaimana tanggapan kelompok pengusaha dan masyarakat terhadap program IPAL-Dewats yang ada di Kampung Batik Laweyan?
- b. Bagaimanakah hubungan antara perubahan perilaku masyarakat dengan tercapainya tujuan program IPAL ?
- c. Bagaimanakah kepatuhan masyarakat selama pelaksanaan program IPAL-Dewats?
- d. Bagaimana evaluasi terkait program IPAL dan harapan-harapan apa saja yang diinginkan dari program IPAL ini?

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si
NIP. 196010091986011001

(.....)
Ketua

2. Asal Wahyuni Erlin M, S.Sos, MPA
NIP. 197406012008012016

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

(.....)
Penguji



HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

ABSTRAK

Husni Arief Lutfiansyah. D0108133. Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2012. 93 Halaman

Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan salah satu ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berguna untuk mengatasi permasalahan pencemaran, khususnya bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kawasan industri kampung batik Laweyan merupakan sentra batik penghasil limbah cair yang menjadi salah satu penyebab timbulnya pencemaran limbah di Kota Surakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implementasi program IPAL di kawasan kampung batik Laweyan dengan menggunakan suatu kriteria atau indikator dalam melakukan evaluasi tersebut. Indikator yang digunakan Adalah : efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui implementasi program IPAL di kawasan industri kampung batik Laweyan ditinjau dari indikator efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2006. Aspek efektivitas program ini sudah efektif ditinjau dari dapat berkurangnya tingkat pencemaran hingga 70%. Aspek efesiensi juga sudah cukup baik, ditinjau dari biaya pengeluaran untuk perawatan IPAL yang sangat murah dan mendapatkan hasil cukup baik. Dalam aspek kecukupan banyak manfaat yang diperoleh dari program IPAL seperti penurunan angka pencemaran, kawasan industri yang bersih dan tertata dengan rapi serta pencitraan menjadi sangat baik. Aspek perataan ditujukan dengan hubungan kekerabatan sosial yang baik antara pengusaha dengan pengusaha maupun pengusaha dengan masyarakat. Dalam aspek responsivitas diperoleh tanggapan yang positif walaupun pada awal pembuatan IPAL ada sedikit kesalahpahaman antara pengusaha dan masyarakat sekitar. Tanggapan positif dapat dilihat dari kepatuhan pengusaha dan masyarakat sekitar dalam menjaga, merawat dan melestarikan IPAL.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, Program IPAL, Kampung Batik Laweyan

ABSTRACT

Husni Arief Lutfiansyah. D0108133. Evaluation of the Implementation of Waste Water Treatment Plant (WWTP) Program in the Industrial Area of *Kampung Batik Laweyan* Surakarta. Graduating Paper. Department of Administrative Sciences. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret. 2012. 93 Pages

The WWTP Program is regulated under the Act of Local Government of Surakarta No. 2/2006 on environmental control to solve pollution problems, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The industrial area of Kampung Batik Laweyan is the center of batik production, causing waste water pollution in Surakarta. This study tried to evaluate the implementation of the WWTP Program in the industrial area of Kampung Batik Laweyan using the criteria or indicator of evaluation include: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness.

This research is a descriptive study using interviews and document reviews for data collection. The informants was selected using purposive sampling technique. The validity of the data was performed using data/sources triangulation. The data collected then was analyzed using interactive analysis model.

Based on this research, it was found that the implementation of the WWTP Program in the industrial area of Kampung Batik Laweyan in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness, are in accordance with the provisions of the Act of Local Government of Surakarta No. 2/2006 . Aspects of the effectiveness shown by the effective achievement of this program in terms of pollution levels that can be reduced until 70%. Aspect of efficiency is also found good enough, in terms of less spending on maintenance costs compare to the good results. In the aspect of adequacy, there are some advantages such as less pollution, clean and neat industrial area, good performance. Aspects equity addressed by the social kinship among entrepreneurs as well as between entrepreneurs and the community. In the aspect of responsiveness , a positive response is obtained even though at the beginning there is a little misunderstanding between employers and the community. Positive response shown by the compliance of employers and communities in maintaining, caring for, and preserving the WWTP.

Keywords: Evaluation of Policy Implementation, Waste Water Treatment Plant (WWTP) Program, *Kampung Batik Laweyan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan sistem pengolahan limbah cair secara terdesentralisasi. Teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta, teruji untuk pengolahan air limbah organik dan sanitasi yang berbasis pada masyarakat. Teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) banyak diaplikasikan sebagai pengolahan limbah peternakan, industri pengolahan makanan, limbah domestik (*Sanimas*), limbah rumah sakit dan hotel.). Program ini diatur di dalam suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Banyak permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan seperti permasalahan pencemaran sumber-sumber air, seperti air permukaan dan air tanah oleh berbagai macam aktivitas manusia. Sumber-sumber pencemaran tersebut antara lain berasal dari aktivitas sehari-hari manusia, industri, dan pertanian. Limbah yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia tersebut dapat berupa limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari berbagai kegiatan rumah tangga. Limbah domestik ini antara lain adalah detergen dari kegiatan mencuci yang

commit to user

dilakukan penduduk yang tinggal di bantaran sungai, sampah rumah tangga yang juga di buang langsung ke badan air, dan juga kotoran manusia. Sedangkan limbah industri dapat berasal dari industri berskala kecil hingga berskala besar, seperti industri pembuatan tahu, penyamakan kulit, pulp, tekstil (batik).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik atau industri di Kota Surakarta. Pembuangan limbah industri yang tidak ramah lingkungan akan mengganggu ekosistem dalam lingkungan tersebut, dari pencemaran lingkungan sampai mengganggu rantai kehidupan ekosistem. Masalah pencemaran limbah industri disini terkait limbah industri yang di akibatkan oleh sisa-sisa proses dari industri pembuatan batik. Banyak UKM batik di Kota Surakarta yang belum baik dalam mengolah sisa dari proses pembuatan limbahnya. Salah satu contohnya adalah UKM di kawasan industri Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan adalah salah satu kawasan industri batik di Kota Surakarta yang juga merupakan kawasan wisata. Di kawasan ini, produksi batik sudah merupakan usaha yang telah berlangsung secara puluhan tahun tidak kurang dari lima belas industri kecil batik melakukan berbagai jenis batik dikawasan yang masih kental dengan suasana tradisional. Kampung Batik Laweyan hingga kini menjadi salah satu kawasan yang sedang ditingkatkan potensinya, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata.

Berkembangnya pusat kawasan batik di daerah Laweyan tidak terlepas dari dari usaha kecil rumahan penduduk setempat, namun sangat

disayangkan pengolahan limbah industri belum diatur layaknya industri besar yang mengharuskan pengolahan limbah sisa produksi, dalam hal ini adalah limbah cair. Pembuangan limbah industri yang tidak ramah lingkungan akan mengganggu ekosistem dalam lingkungan tersebut, dari pencemaran lingkungan sampai mengganggu rantai kehidupan ekosistem. Kawasan Batik Laweyan ini merupakan kawasan dimana dilewati oleh aliran Sungai Jenes, dimana oleh akibat aktivitas dari kegiatan proses pembuatan batik disini sisa-sisa atau limbah cair dari proses pembuatan batik tersebut di alirkan ke sungai tersebut sehingga berdampak terjadinya pencemaran terhadap sungai tersebut.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air oleh limbah cair, diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat, instansi terkait, dan pemerintah. Adanya permasalahan pencemaran air menyebabkan berbagai dampak negatif yang sekarang ini sangat terasa, terutama di daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tersebut adalah kelangkaan air bersih yang nantinya akan berdampak pula pada kesehatan masyarakat sebagai pengguna air. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair ke sumber air, diperlukan adanya pengolahan limbah cair sebelum di buang ke sumber-sumber air tersebut. Industri kecil dan menengah dapat menggunakan sistem pengolahan limbah cair yang sederhana. Industri-industri besar harus memiliki instalasi pengolahan air limbah sendiri yang memenuhi syarat. Setelah melalui proses pengolahan, apabila limbah cair tersebut masih dapat dimanfaatkan, maka limbah tersebut dapat di daur ulang atau digunakan kembali. Limbah yang tidak dapat

dimanfaatkan kembali, sebelum dibuang ke badan air harus memenuhi standar baku mutu limbah cair. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang dapat ditenggang keberadaannya di dalam limbah cair dari suatu jenis kegiatan tertentu yang akan dibuang (Effendi, 2003).

Dari permasalahan tersebut dalam menangani masalah pencemaran yang terjadi di kawasan Kampung Batik Laweyan adalah melalui Program Pengendalian Lingkungan khususnya limbah cair. Upaya yang dilakukan adalah melalui program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan pengembangan dari Teknologi yang didesain untuk pengolahan limbah batik dan printing kalangan UKM (usaha kecil dan menengah) seperti di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta. Konsep Teknologi IPAL memanfaatkan energi gravitasi secara bejana berhubungan dengan proses biologis, yang tidak perlu in put energi listrik dan bahan kimia.

Penggunaan Teknologi IPAL diperoleh keuntungan, disamping mudah operasional dan perawatan, juga murah (*low maintenance*). Tujuan utama dari pengolahan air limbah disini ialah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan maksud ingin mengetahui bagaimana evaluasi implementasi program IPAL (instalasi pengolahan air

limbah) di kawasan industri kampung batik laweyan ditinjau dari kriteria atau indikator terkait evaluasi implementasi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional

- a. Untuk mengetahui implementasi Program IPAL dilaksanakan di Kampung Batik Laweyan.
- b. Untuk mengetahui hasil implementasi program IPAL di Kampung Batik Laweyan yang dicapai bermanfaat atau tidak.

2. Tujuan Fungsional

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas atau Instansi terkait khususnya Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam pengendalian lingkungan hidup khususnya pada pengelolaan air limbah dengan menggunakan penerapan sistem IPAL di Kampung Batik Laweyan.

3. Tujuan Individual

Sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Badan Lingkungan Hidup (Pemerintah)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi Lingkungan Hidup dalam upaya mengurangi atau menanggulangi permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh air limbah.

2. Manfaat bagi Mahasiswa

Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan juga sebagai acuan yang dapat membantu para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah dengan menggunakan IPAL.

3. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan air limbah dengan menggunakan IPAL khususnya limbah di daerah Kampung Batik Laweyan kepada masyarakat secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik adalah:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye (Budi Winarno, 2008:17) juga menyebutkan bahwa kebijakan adalah :

“kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan yang diberikan oleh Dye disini dianggap agak tepat, namun batasan disini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.”

Menurut Robert Eyestone (Budi Winarno, 2008:17) menyebutkan bahwa kebijakan adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dibuat Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program, Hal ini dikemukakan oleh Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008 : 144). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat menapai tujuannya, tidak kurang tidak lebih. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009 : 494).

Menurut pendapat lain (dalam Winarno, 2008 : 146), Van Meter dan Van Horn telah membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok), pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dari suatu kebijakan itu ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat (Udoji, dalam Wahab, 2010:59) bahwa:

“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan, implementasi mencakup banyak macam kegiatan:

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (Budi Winarno, 2007:145)

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah UU ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2007:146-147).

B. Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Implementasi

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik

buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984: 16). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek (Wibawa, 1994: 9) yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan,
2. Proses implementasi kebijakan,
3. Konsekuensi kebijakan,
4. Efektivitas dampak kebijakan

Sementara itu Pall (1987: 52) membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu: 1) *Planning and need evaluations*, 2) *Process evaluations*, 3) *Impact evaluations*, 4) *Efficiency evaluations*,

Menurut Ripley (1985:19), evaluasi implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses.
2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan.
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

Menurut William E. Kovacic (2006) mengemukakan :

Evaluations may indicate needed adjustments in the competition agency's statutory authority. In recent decades, many competition authorities have sought and obtained important enhancements in the framework of laws, and there is every reason to believe that a key to effectiveness over time will be the installation of periodic upgrades to account for past experience and new conditions. A program of performance measurement and evaluation can supply a better empirical foundation for designing and justifying needed changes. (Evaluasi dapat menunjukkan perubahan yang dibutuhkan dalam otoritas legal lembaga persaingan itu. Dalam beberapa dekade terakhir, otoritas persaingan banyak dicari dan diperoleh tambahan penting dalam kerangka hukum, dan ada setiap alasan untuk percaya bahwa kunci untuk efektivitas dari waktu ke waktu akan menjadi instalasi upgrade berkala untuk memperhitungkan pengalaman masa lalu dan kondisi baru. Sebuah program pengukuran kinerja dan evaluasi dapat menyediakan dasar empiris yang lebih baik untuk merancang dan membenarkan perubahan dibutuhkan).

Mengenai konsep implementasi sendiri, Presman dan Wildavsky (dalam Wahab, 2002: 60) mengartikannya, sebagai *"to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete"*. Sedangkan Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa, 1994) mengartikan sebagai *"Those action by public an private individual (or groups) that are directed at the achiefment of objectives set fort in prior policy decisions"*.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Udoji, dalam Abdul Wahab, 1991: 45). Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.

Menurut Anderson (1979: 68), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: 1) siapa yang mengimplementasikan, 2) hakekat dari proses administrasi, 3) kepatuhan, dan 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Linberry (dalam Putra, 2003:81) juga menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut : (1) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; (2) penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP); (3) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/ badan pelaksana, (4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Menurut Effendi (dalam Nugroho, 2003: 194) tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi-variasi dalam indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? (3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

Lester dan Steward (dalam Nugroho, 2003:197) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi empat , yaitu:

1. Evaluasi proses: evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.
2. Evaluasi impact : evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan: evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.
4. Metaevaluasi: berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur / standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “*what’s happening*” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dimana kriteria ini peneliti gunakan sebagai indikator penelitian dalam mengevaluasi implementasi program IPAL di kawasan industri kampung batik Laweyan Surakarta. Peneliti menggunakan indikator evaluasi yang di ungkapkan dunn. Alasan peneliti memilih kriteria ini sebagai indikator karena

indikator ini merupakan indikator-indikator yang paling cocok untuk membantu penulis mengetahui bagaimana evaluasi implementasi dari program IPAL di kampung Batik Laweyan sehingga dapat menjadi pedoman peneliti selama di lapangan. Indikatornya sebagai berikut :

Tabel II.1
Kriteria Evaluasi (Indikator Evaluasi)

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara

(Sumber: Dunn, 2003:610 *Analisis Kebijakan Publik*)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya

yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan

Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

(Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat

Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

(Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya

ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

1. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
2. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

(Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada *commit to user*

satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi,

atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003:612), yakni:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai

merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (*self evident*) atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.

4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Menurut Sugiharto, 1987 (dalam Effendi, H. 2003) Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. Sugiharto juga menyatakan, bahwa usaha untuk mengatasi pencemaran pada dasarnya terdiri dari pengolahan limbah dan

mendaur ulang limbah. Sebelum dibuang ke badan perairan, limbah harus diolah terlebih dahulu. Tujuan utama pengolahan limbah adalah untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya limbah, terutama untuk mengurangi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh organisme patogen di dalam limbah, sehingga air buangan (*Effluent*) tersebut tidak membahayakan kesehatan manusia. Tujuan lain adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Program IPAL diatur dalam Perda kota Surakarta no. 2 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup. Kota Surakarta sebagai Kota Budaya terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dimana dengan adanya kebijakan ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, dan terpadu.

Permasalahan mengenai pengelolaan air limbah dalam Perda Nomor 2 tahun 2006 ini dikaji dalam BAB IV yaitu tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dimana termasuk kedalam Pasal 9 yaitu dengan ketentuan : mewajibkan setiap orang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah (IPAL),

melarang setiap orang melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran dan air limbah yang dibuang ke sumber air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Menurut Moersidik, 2001 (dalam Effendi, H. 2003) prinsip dasar pengolahan limbah cair secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Pengolahan awal (*Preliminary treatment*), yaitu pengkondisian air limbah sebelum melalui proses limbah lebih lanjut,
- 2) Pengolahan primer, pada umumnya melibatkan penyaringan, menghilangkan kerikil dan sedimentasi. Pada proses ini dapat mengurangi 30% BOD, 60% COD dan 60% Zat tersuspensi (SS)
- 3) Pengolahan skunder atau disebut pengolahan tingkat dua, dilakukan sebagai pengolahan dengan menggunakan dan memanfaatkan pengurangan bahan organik, pada tingkat ini dapat menghilangkan 70% BOD, COD dan SS dari konsentrasi awal.
- 4) Pengolahan tersier, yaitu pengolahan yang diperlukan untuk mengolah lebih lanjut limbah dengan mengurangi bau, warna, ataupun nutrien.

Usaha untuk mengendalikan beban limbah yang masuk ke perairan/badan air akibat adanya kegiatan produksi dapat dikendalikan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, pengelolaan air limbah

sebaiknya diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan dan kondisi yang berkembang, sangat diperlukan pemahaman mengenai karakteristik air limbah guna merencanakan dan menerapkan IPAL sebagai berikut:

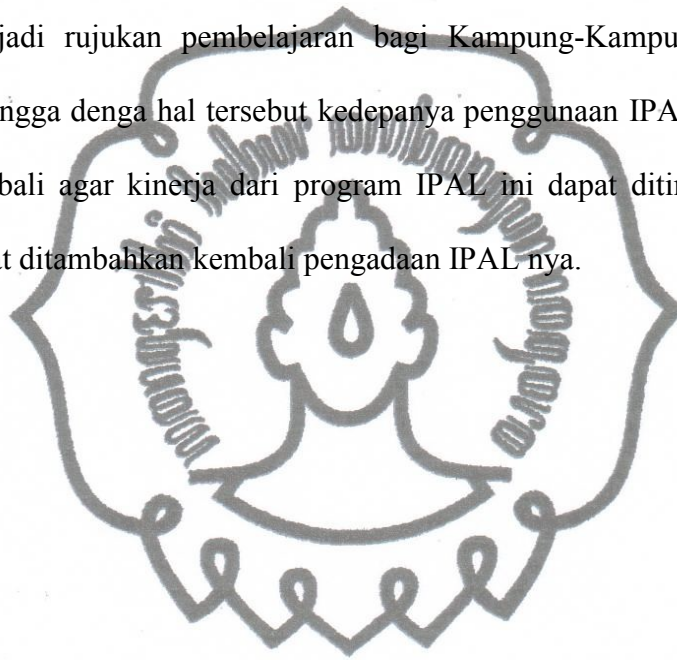
1. *Sources of water*, penggolongan sumber air limbah berdasarkan jenis *influent* industrinya.
2. *Flow rate dan flow pattern*, tingkat aliran *influent* dan sifat aliran yang terjadi pada buangan air limbah (*batch, contionous, intermittent*).
3. pH, diperlukan sebagai indikator keasaman, netral, kebasaan dari suatu larutan buangan air limbah.
4. COD (*Chemical Oxygen Demand*), ukuran dari total organik karbon dalam larutan yang mengandung bahan kimia yang memerlukan oksigen dalam proses oksidasinya, atau oksigen yang diperlukan untuk proses kimia pada larutan yang mengandung bahan kimia.
5. BOD (*Biological Oxygen Demand*), ukuran dari oksigen terlarut yang dipakai oleh mikro organisme dalam proses oksidasi biologi zat tersebut.
6. *Suspended Solid*, adalah partikel padatan mineral *inert* yang akan mengembang sebagai padatan terlarut.

7. Oil dan Grease, paduan dari minyak dan lemak bebas yang mengapung dipermukaan dalam bentuk emulsion.
8. *Nutrient Content*, bahan makanan yang diperlukan untuk proses pertumbuhan di dalam air limbah.
9. *Toxic Chemical Types*, merupakan larutan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup.
10. *Consistency Of Wastewater Quality Content*, keajekan dari kualitas air limbah yang masuk pada unit pengolahan.
11. *Flexibillita* peralatan, digunakan untuk menyatakan kemampuan instalasi pengolahan limbah untuk diimplementasikan pada segala jenis industri dan sistem peralatan yang tersedia di pasaran termasuk kemampuannya untuk digabungkan dengan peralatan lainnya (mudah dimodifikasi)

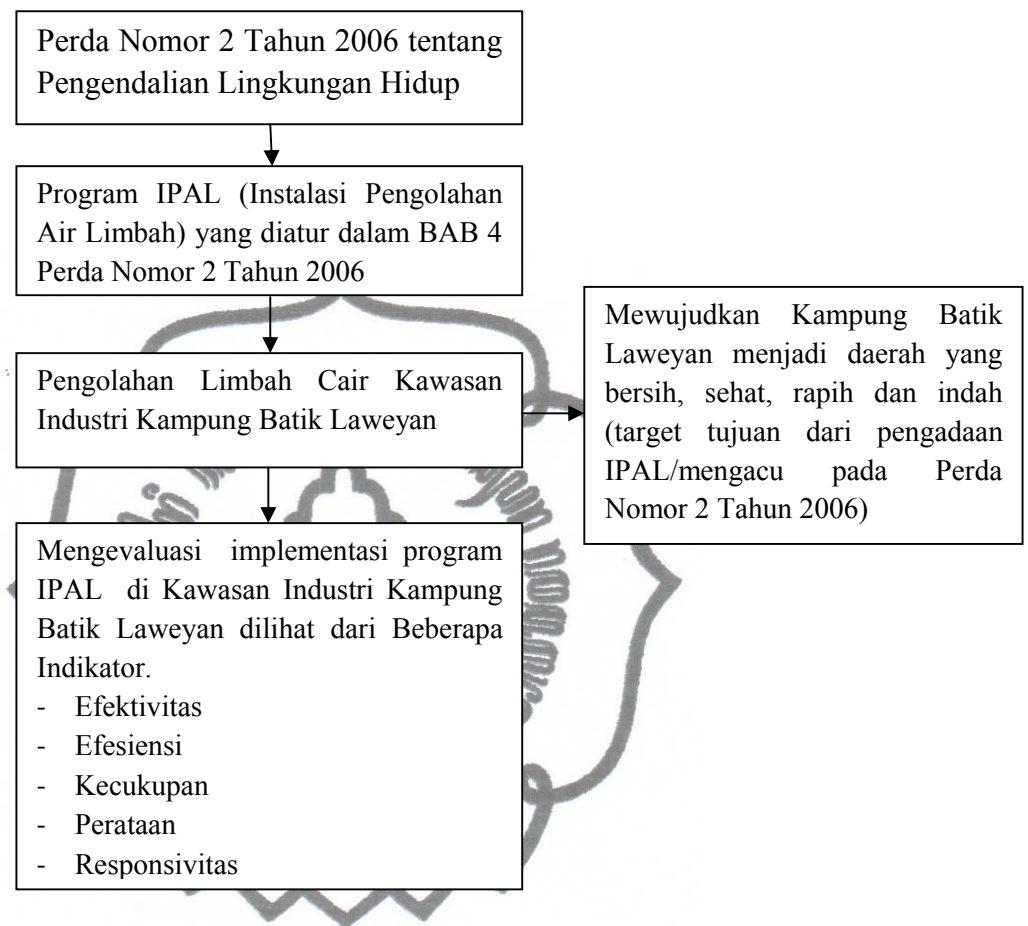
Menurut Capodaglio, Andrea G (2010) mengemukakan :

“Wastewater treatment plant automation and real time control have become important topics of research and development. real time control is nowadays considered a desirable goal for medium to large sized utilities for attaining better treatment efficiencies and improved compliance with discharge permit limitations. For an efficient implementation, real time control must be supported by adequate modelling methodologies that take into full account the dynamic properties of the treatment system.” (Pengolahan air limbah pabrik otomatisasi dan kontrol langsung telah menjadi topik penting dari penelitian dan pengembangan. pengendalian waktu saat ini dianggap sebagai tujuan yang diinginkan untuk menengah untuk utilitas berukuran besar untuk mencapai efisiensi pengobatan yang lebih baik dan kepatuhan ditingkatkan dengan keterbatasan izin debit. Untuk implementasi yang efisien, kontrol waktu nyata harus didukung oleh metodologi pemodelan yang memadai yang memperhitungkan penuh sifat dinamis dari sistem pengobatan.

Program IPAL disini khususnya Instalasi Pengolahan Air Limbah yang ada di kampung Batik Laweyan ini menjadi suatu sorotan serta topik penting bagi masyarakat luas, baik dari masyarakat Kota Surakarta maupun masyarakat dari berbagai daerah terutama dari Kampung Batik luar daerah dikarenakan IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan menjadi rujukan pembelajaran bagi Kampung-Kampung Batik lainnya. Sehingga dengan hal tersebut kedepannya penggunaan IPAL ini dapat dikaji kembali agar kinerja dari program IPAL ini dapat ditingkatkan ataupun dapat ditambahkan kembali pengadaan IPAL nya.



E. Kerangka Berfikir



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

Dari kerangka berfikir diatas dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, kewajiban Pemerintah Daerah adalah dapat Mengendalikan Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan. Dalam permasalahan penelitian ini peneliti mengambil masalah mengenai permasalahan limbah industri sehingga dengan adanya masalah limbah ini dengan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2006 maka solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut adalah dengan diturunkanya suatu program, yaitu program IPAL (Instalasi Pengolahan Air

Limbah). Masalah pencemaran yang peneliti kaji adalah pencemaran terkait limbah cair dari industri batik. Pencemaran limbah akibat industri batik di Kota Surakarta salah satunya adalah limbah batik dari kawasan industri Kampung Batik Laweyan. Pengolahan limbah cair di kawasan kampung batik laweyan menggunakan program IPAL.

Pengolahan limbah dengan menggunakan program IPAL disini adalah untuk mewujudkan Kampung Batik Laweyan menjadi daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah. Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan dengan maksud ingin mengetahui bagaimana evaluasi implementasi program IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di kawasan industri kampung batik laweyan ditinjau dari kriteria atau indikator terkait evaluasi implementasi. Indikator evaluasi implementasi yang digunakan dalam mengevaluasi implementasi program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan meliputi : aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan kondisi objek atau keadaan serta fenomena sosial yang sebenarnya dan permasalahan yang ditemui. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh/ tingkah laku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti hanya menggambarkan/menjelaskan tentang Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di kawasan Industri Kampung Batik Laweyan. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh H.B. Sutopo (2002:111) bahwa penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan dengan pertimbangan:

1. Daerah Laweyan merupakan daerah industri batik dengan unsur budaya yang terkenal di kota Surakarta.
2. Air limbah hasil olahan industri batik di daerah Laweyan banyak menggenangi sungai-sungai di sekitar daerah Surakarta

commit to user

3. Tersedianya data yang menunjang penelitian. Hal ini memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian di kampung batik Laweyan.
4. Diberikannya izin penelitian oleh instansi yang bersangkutan karena tanpa diperolehnya izin, penelitian ini tidak dapat berlangsung.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami (H.B Sutopo, 2002 : 49). Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010 : 156). Dalam hal ini, sumber data yang langsung memberikan data adalah narasumber atau informan. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H. B. Sutopo, 2002 : 50). Informan tersebut adalah:

commit to user

- a. Bapak Bambang Wijayani selaku Kepala Subbidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk memperoleh kedalaman informasi tentang Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.
- b. Bapak Sultan N selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk memperoleh kedalaman informasi tentang Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.
- c. Bapak Arif (Batik Mahkota) selaku Pengusaha Batik sebagai subjek yang melaksanakan program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
- d. Masyarakat atau warga sekitar Kampung Batik Laweyan sebagai subjek dari terkena dampaknya adanya penggunaan program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010 : 156). Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti

dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung maupun tidak, sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002:54).

Peneliti menggunakan dokumen Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai sumber penelitian. Selain itu juga terdapat dokumen resmi dan arsip-arsip sebagai bahan tertulis juga data dan artikel maupun internet yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moelong, 2006 : 186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2010 : 157).

H.B. Sutopo (2002 : 58) mengemukakan:

”Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konsep mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi tanggapan atau persepsi tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.”

Wawancara dilakukan dalam waktu dan kondisi yang dianggap paling tepat guna mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan dokumen, yaitu informasi yang berupa artikel-artikel, laporan studi yang relevan dengan obyek penelitian, maupun arsip-arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai bahan acuan. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo, 2002:54). Peneliti Mencatat data-data, dokumen, arsip dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini akan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010 : 96). Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh informasi dari Kepala Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, pengusaha batik dan juga warga atau masyarakat sekitar kawasan Kampung Batik Laweyan.

F. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas ini merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian (H. B. Sutopo, 2002 : 77-78). Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Tujuan penggunaan teknik ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2002 : 78), teknik *commit to user*

trianggulasi dibedakan menjadi empat yaitu trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi metodologis, trianggulasi teoritis. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini akan digunakan cara trianggulasi data. Dalam trianggulasi data peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda-beda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti peneliti mencoba membandingkan informasi yang diperoleh. Data dari sumber yang satu dicocokkan dengan sumber yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini perlu diuji validitasnya dengan melakukan *cross check* antara Kepala Sub Bagian Pengembangan Kapasitas BLH dan Kepala Sub Bagian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH yang berbeda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. Kemudian dari hasil wawancara dengan sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga di *cross check* dengan Pengusaha Batik dan Masyarakat disekitar Kampung Batik Laweyan.. Apabila dari narasumber yang berbeda menyatakan hal sama berarti data tersebut valid.

G. Teknik Analisis Data

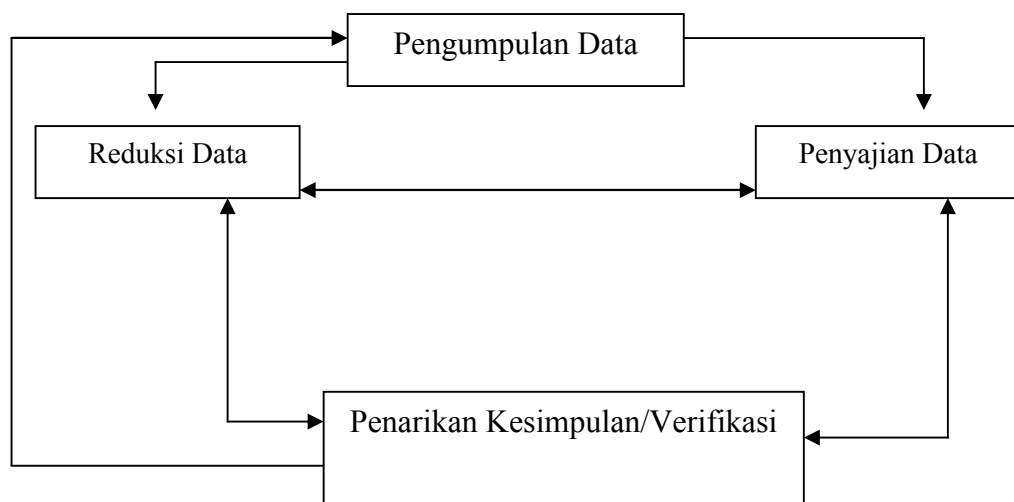
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. Teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 2002: 94).

Gambar III.1

Model Analisis Interaktif

(H.B. Sutopo 2002:96)



Keterangan :**a. Reduksi data**

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan (H. B. Sutopo, 2002: 92). Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian berakhir.

b. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan (H. B. Sutopo, 2002: 92). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci

untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Penarikan simpulan/ verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti tentang arti data yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab-akibat, dan proposisi, pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (H. B. Sutopo, 2002: 93).

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kampung Batik Laweyan

Kota Surakarta merupakan kota yang identik dengan batiknya. Terdapat dua tempat sebagai produsen batik terbesar di kota Surakarta yakni Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman, namun kami menyoroti Kampung Batik Laweyan sebagai tempat melakukan penelitian. Berikut beberapa potensi wilayah yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan kota budaya di Jawa Tengah dengan mengusung slogan “*Solo The Spirit Of Java*” yang menjadi *trend setter* kota / kabupaten lain terutama di bidang ekonomi dan budaya. Meskipun luas wilayahnya tidak begitu besar dan Sumber Daya Alamnya (SDM) tidak melimpah namun Kota Solo mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan memanfaatkan semua kelebihan yang ada di dalamnya, Surakarta mampu menarik perhatian daerah lain bahkan mancanegara.

Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol identitas Kota Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai jual. Seni dan pematikan Solo menjadi pusat batik di Indonesia. Apalagi setelah resmi dibuka Kampung Batik Laweyan menjadi ikon area penuh dengan wisata batik

commit to user

dari proses pembuatannya sampai penjualannya. Pariwisata dan perdagangan tidak bisa dipisahkan, keduanya saling mendukung meningkatkan sektor ekonomi.

Berbeda dengan kegiatan perdagangan, sektor pertanian kurang bisa diandalkan, kebutuhan pokok seperti beras, sayur - sayuran dan bahan dasar protein harus bergantung daerah lain karena keterbatasan lahan. Secara kumulatif, sektor tersier yang terdiri dari usaha perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan, dan komunikasi serta jasa. Terdapat beberapa industri pengolahan yang didominasi oleh industri rumah tangga, kebanyakan industri bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya mencapai pasar internasional.

a. Sejarah Kampung Batik Laweyan

Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh R.T. Mlayadipuro desa Laweyan (kini Kampoeng Laweyan) sudah ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. Sejarah Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng Hanis bermukim di desa Laweyan. Pada tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati) dan membelakangi jalan yang menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan Dr. Rajiman). Kyai Ageng Henis adalah putra dari Kyai Ageng Sela yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau Kyai

Ageng Laweyan adalah juga “manggala pinatuwaning nagara” Kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546.

Setelah Kyai Ageng Henis meninggal dan dimakamkan di pasarean Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai Ageng Henis ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 M Sutowijoyo lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (Pasar Laweyan). Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede) dan menjadi raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senopati yang kemudian menurunkan raja – raja Mataram.

Masih menurut RT. Mlayadipuro Pasar Laweyan dulunya merupakan pasar Lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring, dan Gawok yang masih termasuk daerah Kerajaan Pajang.

Adapun lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan pasar Laweyan di tepi sungai Kabanaran terdapat sebuah bandar besar yaitu bandar Kabanaran. Melalui bandar dan sungai Kabanaran tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi Sungai Bengawan Solo.

Pada jaman sebelum kemerdekaan kampung Laweyan pernah memegang peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa pertumbuhan pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam (SDI) berdiri di kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudi sebagai pendirinya. Dalam bidang ekonomi para saudagar batik Laweyan juga merupakan perintis pergerakan koperasi dengan didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemi Putera Soerakarta” pada tahun 1935.

b. Arsitektur Kampung Batik Laweyan

Masyarakat Laweyan bukanlah keturunan bangsawan, tetapi karena mempunyai hubungan yang erat dengan kraton melalui perdagangan batik serta didukung dengan kekayaan yang ada, maka corak pemukiman khususnya milik para saudagar batik banyak dipengaruhi oleh corak pemukiman bangsawan Jawa. Bangunan rumah saudagar biasanya terdiri dari pendopo, ndalem, sentong, gandok, paviliun, pabrik, beteng, regol, halaman depan rumah yang cukup luas dengan orientasi bangunan menghadap utara-selatan. Atap bangunan kebanyakan menggunakan atap limasan bukan joglo karena bukan keturunan bangsawan.

Dalam perkembangannya sebagai salah satu usaha untuk lebih mempertegas eksistensinya sebagai kawasan yang spesifik, corak bangunan di Laweyan banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa dan Islam, sehingga banyak bermunculan bangunan bergaya arsitektur

Indisch (Jawa – Eropa) dengan fagade sederhana berorientasi ke dalam, fleksibel, berpagar tinggi, lengkap dengan lantai yang bermotif karpet khas Timur Tengah. Keberadaan “beteng” tinggi yang banyak memunculkan gang – gang sempit dan merupakan ciri khas Laweyan selain untuk keamanan juga merupakan salah satu usaha para saudagar untuk menjaga privacy dan memperoleh daerah “kekuasaan” di lingkungan komunitasnya.

c. Sosial Budaya Kampung Batik Laweyan

Dulu terdapat pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat Laweyan, yaitu kelompok wong saudagar (pedagang), wong cilik (orang kebanyakan), wong mutihan (Islam atau alim ulama) dan wong priyayi (bangsawan atau pejabat). Selain itu dikenal pula golongan saudagar atau juragan batik dengan pihak wanita sebagai pemegang peranan penting dalam menjalankan roda perdagangan batik yang biasa disebut dengan istilah mbok mase atau nyah nganten. Sedang untuk suami disebut mas nganten sebagai pelengkap utuhnya keluarga.

Sebagian masyarakat Laweyan masih tampak aktif nguri – uri (melestarikan) kesenian tradisional seperti musik keroncong dan karawitan yang biasanya ditampilkan (dimainkan) sebagai pengisi acara hajatan seperti manten, sunatan, tetakan, dan kelahiran bayi.

Dalam bidang keagamaan, sebagian besar penduduk Laweyan beragama Islam terlihat aktif menyelenggarakan kegiatan – kegiatan

keagamaan, seperti pengajian, tadarusan, semakan dan aktivitas – aktivitas keagamaan lainnya, baik secara terjadwal maupun insidental.

2. Program IPAL di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan

Pemerintah (Badan Lingkungan Hidup) dalam menangani masalah pencemaran yang terjadi di kawasan Kampung Batik Laweyan adalah melalui Program Pengendalian Lingkungan khususnya limbah cair. Upaya yang dilakukan BLH adalah melalui program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). IPAL ini merupakan sistem pengolahan limbah cair secara terdesentralisasi, terdiri dari modul-modul pengolahan yang sesuai untuk aplikasi dan desiminasi yang mudah dalam pengoperasian dan perawatan.

Konsep Teknologi IPAL memanfaatkan energi gravitasi secara bejana berhubungan dengan proses biologis, yang tidak perlu input energi listrik dan bahan kimia. Penggunaan Teknologi IPAL diperoleh keuntungan, disamping mudah operasional dan perawatan, juga murah (*low maintenance*). Teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan pengembangan dari Teknologi yang didesain untuk pengolahan limbah batik dan printing kalangan UKM (usaha kecil dan menengah) seperti di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta.

Bekerjanya seluruh komponen atau sub sistem tersebut akan menjamin keberlangsungan dan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan limbah batik, yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



Gambar IV.I Proses Sistem Jaringan Air Limbah Batik dan IPAL Kampung Batik Laweyan

Secara ringkas gambar di atas dijelaskan sebagai berikut: Limbah cair batik ditampung di bak penampungan air limbah di masing-masing pabrik dialirkan melalui Scum Trap yang diukur volumenya. Setelah melalui instrumentasi air limbah dialirkan ke dalam saluran jaringan air limbah. Dalam jarak tertentu, di dalam saluran jaringan air limbah dibangun bak kontrol serta di dua titik persimpangan dipasang bak intake yang sekaligus berfungsi sebagai Scum Trap.

Setelah melewati Scum Trap air limbah ditampung pada Bak Equalisasi Aerob (A), melalui pipa disalurkan ke dalam Bak Equalisasi

Anaerob, dan Sedimentasi dan Netralisasi/Septictank (B). Dari bak B, air limbah masuk ke bak C (Baffle Reaktor). Di dalam bak B sudah terjadi proses pengendapan (sedimentasi) awal, netralisasi dan proses homogenitas dari limbah yang berasal dari beberapa pabrik.

Air limbah mengalir masuk ke dalam Bak C (Baffle Reaktor) sebagai bak utama untuk proses dekomposisi air limbah. Di dalam Baffle Reaktor dipasang media penambat tempat berbiaknya mikroba. Setelah di proses pada Bak C air limbah menuju ke Bak D (Anaerobic Stabilisasi) dan ke E (Anaerob Filter) diabsorb dalam bak F dan G (kolam Aerob). Air yang keluar dari pengolahan ini dialirkan ke H (kolam kontrol) untuk dibuang ke saluran/sungai. Pengurasan pada Bak Sedimentasi, Baffle Reaktor dan Anaerobik Filter direncanakan 1-2 tahun sekali. Kolam kontrol juga untuk mengambil sampel air limbah.

B. Evaluasi implementasi program IPAL di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta

Proses evaluasi implementasi program IPAL di Kampung Batik Laweyan akan dilihat dari indikator menurut William dunn yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Indikator ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

commit to user

Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana dalam pelaksanaan program IPAL di kampung Laweyan ini sudah sejalan dengan tujuan dari kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup, seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan :

“Program IPAL itu kan memang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup. Kebijakkannya itu kan perda nomor 2 tahun 2006, setelah itu kemudian kami dengan Kementerian memfasilitasi pembuatan IPAL. Jadi, memang itu harus dilaksanakan. Dikarenakan memang program IPAL ini merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.” (Wawancara 7 Juni 2012)
Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup,

Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si menambahkan tujuan dari IPAL :

“Ya pasti sejalan dong, memang kita tujuannya di kebijakan ini untuk melakukan atau mengadakan program IPAL. Tetapi, kalau apakah itu efektif atau tidak ya memang tidak efektif, itu karena yang seharusnya membuang limbahnya itu sekitar 40 industri tetapi yang tercover IPAL hanya 9. Jadi kalau mau di bilang sudah efektif itu belum efektif. Tetapi itu memang adalah pilot proyek untuk bisa direplikasikan.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Dilihat dari sudut pandang yang berbeda pun yaitu oleh Bapak Arief selaku pengurus Forum Pengembangan Pengembangan Kampung Batik Laweyan Surakarta sekaligus merupakan pengusaha batik di sana juga sependapat bahwa program IPAL ini sudah sejalan dengan tujuan dari kebijakan, seperti apa yang beliau katakan :

“Pasti sudah sejalan ya, karena inikan program dari kebijakan tersebut, dan terbentuknya IPAL disinikan support dari
commit to user

kementerian lingkungan hidup dan kerjasama GTZ dari pemerintahan Jerman.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Program IPAL ini selain berpengaruh terhadap para pengusahanya, dengan adanya program ini juga dapat berpengaruh terhadap masyarakat, dimana masyarakat disini adalah objek yang terkena dampak pelaksanaan dari kegiatan IPAL ini sehingga masyarakat disini juga perlu ikut ambil peran dalam upaya untuk melakukan pengevaluasian terhadap implementasi program IPAL di Kampung Batik Laweyan ini. Terkait dengan pelaksanaan program IPAL sudah berjalan sesuai tujuan dari kebijakan lingkungan hidup, Bapak Rahmadi selaku warga setempat atau orang yang terkena dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pelaksanaan IPAL ini mengungkapkan :

“Kalau setahu saya tujuan dari ipal ini adalah mengurangi pencemaran yang dihasilkan limbah pabrik batik yang ada disini. Hasil pelaksanaannya ipal tersebut mampu mengurangi pencemaran yang terjadi di Kampung Batik Laweyan, walaupun belum semua dibangun ipal namun setidaknya ipal yang ada disini bisa menjadi contoh yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Pengadaan program IPAL ini sudah mampu untuk mengurai dan mengurangi kandungan limbah di dalam air walaupun memang belum bisa mencapai mencapai 100 %. Program ini dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran khususnya pencemaran air limbah hal ini dikarenakan dengan adanya program IPAL ini dibuat untuk harus dapat mengurai air limbah agar dapat memenuhi standar baku mutu air. Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si menjelaskan bahwa :

“IPAL itu dibuat supaya limbah yang dihasilkan oleh pabrik industri batik di Kampung Batik Laweyan itu di olah sebelum masuk dan sebelum di buang ke badan air (sungai), sehingga intinya adalah kenapa harus di olah, karena sebelum dia masuk ke badan air (sungai) itu harus memenuhi baku mutu. Baku mutu itu adalah standar yang harus dipenuhi atau standar minimal yang harus dipenuhi sehingga pencemaran yang masuk ke standar minimal yang diperkenankan untuk dipenuhi sebelum dibuang ke media lingkungan. Dengan adanya IPAL disini bukan hanya melihat dari sisi dapat mengurai limbah, tetapi IPAL ini harus dapat mengurai air limbah atau harus memenuhi baku mutu jadi bukan hanya bisa memenuhi baku mutu tetapi harus memenuhi baku mutu. Penguraian air limbah dengan IPAL ini tetapi minimal biasanya dapat mengurai sekitar 80% dari cakupan baku mutu. Jadi dari beberapa item baku mutu dia harus memenuhi.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Kondisi air yang ada di sungai yang melewati kampung batik laweyan susah untuk dijelaskan, sebab walaupun pengusaha yang ada di kampung batik laweyan disana sudah mempunyai IPAL akan tetapi ketika air sudah ada di sungai atau disalurkan disungai itu sulit untuk kita bandingkan mana air yang telah tersaring oleh IPAL dan mana yang belum tersaring, karena kondisi air sungai disana tidak semata-mata hanya dicemari oleh wilayah setempat tetapi air sungai disana telah tercemar mulai dari wilayah hulu. Seperti halnya yang di katakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si :

“Kondisi limbah air di sungainya itu akumulasi dari berbagai macam sumber limbah, mulai dari hulu sampai ke hilir. Hal ini menyebabkan kondisi tingkat pencemaran limbah yang tinggi di karenakan adanya akumulasi dari berbagai sumber limbah tadi. Jadi, walaupun di Kampung Batik Laweyan sudah menerapkan sistem IPAL akan tetapi diakibatkan karna adanya bawaan limbah dari hulu yang mungkin disebabkan belum menerapkan IPAL perusahaan yang berada di daerah hulu sehingga air sungai yang

commit to user

mengalir sampai area Kampung Batik Laweyan tetap saja tercemar.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Kalau untuk masalah kondisi air susah untuk dijelaskan, karena air sungai yang ada di situ bukan hanya penduduk situ yang mencemari. Orang-orang yang dari Sukoharjo juga mencemari, jadi kalau hanya dikaitkan tidak ada pengaruh, ibarat orang kalau Anda tanya “apakah kalau Anda buang air tawar ke laut itu rasa asin air laut itu jadi berubah?” (Wawancara 18 Juni 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga menambahkan terkait kondisi air di Kampung Batik Laweyan ini, beliau menjelaskan :

“Ya seperti kita lihat sekarang mas. Kondisinya kalau air sungai secara keseluruhan memang belum bisa dikatakan baik, namun kalau kita melihat air yang melewati proses ipal itu airnya lebih jernih dan lebih baik mas. Semoga saja ke depannya pabrik-pabrik besar itu bisa membangun ipalnya sendiri supaya kualitas air sungai juga semakin baik.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu kampung terkenal yang ada di kota Surakarta karena banyak terdapat UKM (Usaha Kecil Menengah) di bidang industri Batik. Disana terdapat 35 UKM di bidang batik dan yang masih aktif 23 UKM, dan baru 40 % yang telah menggunakan sistem IPAL. Oleh karena itu setidaknya pelaku dari UKM tersebut sudah membantu untuk mewujudkan kampung batik Laweyan menjadi daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah. Hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si selaku Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas :

“Kampung Batik Laweyan itukan memang terkenal dengan area kampung batik, di sana terdapat 35 ukm (keseluruhan) sedangkan yang masih aktif saat ini hanya 23 ukm dan baru 11 ukm saja yang sudah menerapkan sistem IPAL ini. Berartikan itu baru 40%nya saja. Jadi dengain itu, setidaknya sudah sedikit membantu Kampung Batik Laweyan agar dapat terwujud daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Kepala Sub bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“kalau kita bicara semua industri di sana memiliki IPAL seperti itu iya (terwujudnya daerah bersih, sehat, rapi dan indah) akan tetapi kalau misalnya dari 100 orang pengusaha atau pengrajin batik hanya 2 pengusaha atau pengrajin yang punya IPAL kan itu tidak bisa dipahami dan tidak bisa memenuhi.”(Wawancara 18 Juni 2012)

Dari sudut pandang yang berbeda juga menambahkan oleh Bapak Arief selaku pengurus Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan sekaligus pengusaha Batik disana mengenai efek dari pengadaan IPAL terhadap laweyan menjadi daerah daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah. Beliau berpendapat bahwa :

“Ya sudah pasti ada pengaruhnya, pengadaan IPAL dapat berpengaruh terhadap kampung batik laweyan yang menjadi daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah. Misalkan saja yang dulunya pengusaha batik di komplain oleh warga sekitar karna membuang limbahnya sembarangan sekarangkan sudah adanya IPAL di sini jadi sangat membantu. Isu-isu limbah batik disinipun sudah sangat berkurang. Jadi dengan adanya hal tersebut tata kelola kebersihan dan keindahan di kampung ini pun dapat lebih terjaga dengan baik sehingga orang yang datang ke Laweyan akan menjadi senang.”(Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga menambahkan terkait dengan adanya IPAL di Kampung Batik Laweyan ini mampu

mewujudkan daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah. beliau mengungkapkan :

“Ya kalau untuk mewujudkan daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah di Kampung Batik Laweyan dipengaruhi oleh kebiasaan warga yang disini untuk selalu mencintai dan menjaga kebersihan serta keindahan di kampung ini. Dengan adanya ipal yang ada disini menunjukkan bahwa kampung ini peduli dengan lingkungan di sekitar kami yaitu sungai yang ada disini.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Dari para informan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dari program IPAL ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan tetapi belum 100% hal tersebut dikarenakan masih adanya para pengusaha yang belum menerapkan/menggunakan sistem IPAL dalam mengurai Limbah dari hasil industri batik. Kondisi air sungai yang melewati kampung batik Laweyan belum dapat terkontrol pencemaran limbahnya sebab bukan hanya dari masyarakat setempat yang mencemari sungai tetapi dari daerah-daerah hulu yang terlebih dahulu mencemari sungai sehingga kampung batik Laweyan belum terwujud menjadi daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah.

2. Efisiensi

Indikator ini berkenaan dengan usaha yang diperlukan yang dihasilkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya

adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dalam mewujudkan atau merealisasikan program IPAL ini mestinya perlu adanya pembiayaan (memerlukan dana) sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut IPAL ini dapat terwujud. Program ini merupakan hibah hasil dari kerjasama antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Jerman sehingga pemerintah tidak mengeluarkan biaya sama sekali. seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Dalam merealisasikan Program IPAL ini kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Itu bantuan, Cuma kalau dari Pemda APBD tidak punya anggaran untuk mrmbangun. Kebetulan dengan kerja sama kementerian LH dan pemerintah Jerman (GTZ) itu

commit to user

merupakan hibah yang di berikan dari pemerintahan Jerman.”
(Wawancara 7 Juni 2012)

Bapak Arief juga menambahkan selaku pengurus FPKBL sekaligus pengusaha batik disana mengungkapkan bahwa :

“Sudah pasti sesuai dengan apa yang diharapkan (dilihat dari sudut pandang selaku pengusaha), pembuatan IPAL ini biayanya dulu sekitar ratusan juta , 300an atau berapa saya kurang tau, tetapi dengan hasil pembuatan IPAL tersebut, berhasil membuat berkurangnya limbah sudah pasti sangat membantu dan sesuai, bahkan kami barharap dengan pengadaan IPAL ini dapat di tambah kapasitasnya, sehingga kedepannya idealnya bukan hanya industri limbah-limbah rumah tangga pun kadang menjadi masalah juga yaa jadi kalau bisa yaa ikut di tangani lah masalah tersebut.”(Wawancara 3 Juli 2012)

Dari hal diatas mestinya dalam menggunakan IPAL ini perlu adanya biaya perawatan terhadap IPAL agar IPAL tersebut dapat berjalan atau digunakan. seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“biaya yang di keluarkanpun sangat murah. Itu paling per bulan Rp. 50.000,00 sampai Rp. 100.000,00. Uang tersebut itu untuk di belikan bekatul, trus ditambah sama bagi yang mengurus (ada tukang yang mengurus perawatan IPAL), Tukangnya itu paling di bayar Rp. 250.000,00 per bulan. Jadi tidak hampir sampai Rp. 500.000,00 itupun di bagi 11 ukm. Katakanlah 11 ukm Rp. 500.000,00 di bagi 11 ukm tidak ada Rp. 50.000,00. Itu termasuk kecil bagi pengusaha batik per bulan hanya Rp. 50.000,00, jadi, biaya perawatan buat IPAL ini cukup ringan.”(Wawancara 7 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“Kalau biaya perawatannya jadi begini, dari awal IPAL itu di bangun itu dengan melibatkan komunitas pengrajin disana, jadi itu dibangun syaratnya mereka harus terlibat dari perencanaan sampai dengan personal, sehingga mereka harus membentuk kelompok atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk mengelola IPAL itu. Jadi yang mengoperasikan yang membiayai dan sejenisnya ya mereka, dan kita tidak ikut campur, kita itu hanya membangunkan kemudian menyerahkan pada masyarakat, intinya itu.”(Wawancara 18 Juni 2012)

Dalam masalah pembiayaan perawatan bapak Arif selaku pengurus FPKBL sekaligus pengusaha batik disana juga menambahkan :

“Biaya perawatan ini sangat murah sekali, hanya perusahaan itu sekitar Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000 per bulan untuk suatu perusahaan itu kan sangat murah sekali yaa, karena IPAL ini kan hanya mengandalkan bakteri pengurai tetapi untuk maintenance itu sangat murah sekali ya.”(Wawancara 3 Juli 2012)

Untuk lebih rincinya terkait masalah biaya perawatan IPAL di kampung batik Laweyan berikut daftar tabel rincian biaya perawatan IPAL di Kampung Batik Laweyan yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota surakarta :

Biaya operasional terdiri atas biaya operasional tetap dan biaya operasional tidak tetap (termasuk maintenance). Adapun biaya operasional tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah untuk tenaga kerja (operator) IPAL. Sedangkan biaya operasional tidak tetap (termasuk maintenance) dikeluarkan secara periodik (3 atau 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali) yang meliputi penambahan nutrisi, material filter, bensin untuk mesin pompa penyedot lumpur. Apabila pompa mesin ini menggunakan energi listrik PLN maka diperlukan biaya tetap, ongkos

untuk PLN. Namun jika menggunakan penggerak motor maka tidak ada biaya tetap karena hanya memerlukan beberapa liter bensin.

Perhitungan biaya pengolahan air limbah per m³ Alternatif 1 yang meliputi tenaga operator 1 orang dan tenaga administrasi 1 orang, biaya nutrient, biaya perawatan filter material, biaya bensin untuk mesin penyedot lumpur, serta biaya perawatan selama satu tahun adalah sebesar Rp. 320,-. Adapun perhitungan biaya pengolahan air limbah per m³ pada Alternatif 2, yang menambah tenaga operator menjadi 2 orang dan tenaga administrasi tetap 1 orang, sedang komponen lain tetap adalah sebesar Rp. 385,-/m³.

Biaya itu termasuk biaya perawatan dan cadangan organisasi sebesar 15 % (untuk Alternatif 1) dari total biaya tenaga kerja dan operasional atau sebesar Rp. 700.350,- setahun. Sedang untuk Alternatif 2 ditetapkan sebesar 10 % dari total biaya tenaga kerja dan operasional atau sebesar Rp. 586.900,- setahun. Mengenai kalkulasi perkiraan biaya operasional dan maintenance pertahun terdapat pada tabel berikut:

**TABEL ALTERNATIF I: ESTIMASI BIAYA OPERASIONAL IPAL
KAMPOENG BATIK LAWEYAN - KOTA SURAKARTA (RUPIAH/TAHUN)**

NO.	URAIAN	BIAYA/TAHUN	KETERANGAN
A.	Tenaga Kerja :		
1.	Tenaga Operator (1 orang)	2.400.000,00	Rp. 200.000 / orang /Bln.
2.	Tenaga Administrasi (1 orang)	1.800.000,00	Rp. 150.000 / orang /Bln.
B.	Nutrient :		
1.	TSP	24.000	4 Kg / tahun
2.	Urea	40.000,00	8 Kg / tahun
3.	Bekatul	60.000,00	24 Kg / tahun
C.	Filter Material :		
1.	Kantong snar penambat	25.000,00	50 kantong/ tahun
2.	Arang Tempurung Kelapa	230.000,00	100 Kg / tahun
D.	Bensin Penyedot Lumpur	90.000,00	10 liter bensin / 6 bln
BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN		4.669.000,00	
BIAYA PERAWATAN 15 % PER TAHUN		700.350,00	
JUMLAH BIAYA / TAHUN		5.369.350,00	
JUMLAH BIAYA / BULAN		447.445,83	
BIAYA PENGOLAHAN / M3		319,60	Kapasitas maksimal 70 m3

Catatan :

1. Upah tenaga kerja 25 s/d 30 % dari upah minimum regional
2. Sludge B3 diproses untuk menjadi pupuk tanaman non pangan

Tabel IV.1 Tabel Estimasi Biaya Operasional IPAL Alternatif I

**TABEL ALTERNATIF II: ESTIMASI BIAYA OPERASIONAL IPAL
KAMPOENG BATIK LAWEYAN - KOTA SURAKARTA (RUPIAH/TAHUN)**

NO.	URAIAN	BIAYA/TAHUN	KETERANGAN
A.	Tenaga Kerja :		
1.	Tenaga Operator (2 orang)	3.600.000,00	Rp. 150.000 / orang /Bln.
2.	Tenaga administrasi (1 orang)	1.800.000,00	Rp. 150.000 / orang /Bln.
B.	Nutrient :		
1.	TSP	24.000	4 Kg / tahun
2.	Urea	40.000,00	8 Kg / tahun
3.	Bekatul	60.000,00	24 Kg / tahun
C.	Filter Material :		
1.	Kantong snar penambat	25.000,00	50 kantong/ tahun
2.	Arang Tempurung Kelapa	230.000,00	100 Kg / tahun
D.	Bensin Penyedot Lumpur	90.000,00	10 liter bensin / 6 bln
BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN		5.669.000,00	
BIAYA PERAWATAN 10 % PER TAHUN		566.900,00	
JUMLAH BIAYA / TAHUN		6.455.900,00	
JUMLAH BIAYA / BULAN		537.991,67	
BIAYA PENGOLAHAN / M3		384,28	Kapasitas maksimal 70 m3

Catatan :

1. Upah tenaga kerja 40 % dari upah minimum regional
2. Tenaga operator kerja bergiliran, 15 hari kerja per bulan
3. Sludge B3 diproses untuk menjadi pupuk tanaman non pangan

Tabel IV. 2 Estimasi Biaya Operasional IPAL Alternatif II

Dalam penggunaan IPAL ini mestinya membutuhkan waktu untuk dapat digunakan agar kinerja dari sistem IPAL ini dapat berjalan secara optimal, sehingga dengan hal tersebut dapat memaksimalkan hasil kinerja

yang didapat dari penguraian yang dilakukan oleh sistem IPAL tersebut. Cepat atau tidaknya kerja sistem IPAL ini tidak bisa digambarkan secara pasti karena hal tersebut tergantung dari isi material yang dimasukan kedalam IPAL yang bertujuan untuk sebagai alat bantu dalam menguraikan Limbah Batik yang ada di Kampung Batik Laweyan. seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si mengungkapkan bahwa :

“proses IPALnya itukan tergantung teknologi yang kita pakai, kalau yang di Kampung Batik Laweyan itu menggunakan lumpur tinja sebagai media bakterinya, jadi sebetulnya berapa bulan dia berfungsi normal ya dirata-rata kalau lumpur tinjanya normal-normal saja sekitar 3 sampai 4 bulan, itu acuan kalau disebut bekerja optimal.(Wawancara 18 Juni 2012)

Hal tersebut juga dipertegas Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Sejak diterapkan IPAL itu butuh waktu penyesuaian, karena namanya bakteri itu untuk bisa hidup itu harus terkondisi di dalam ruangan itu dengan baik, itu perlu waktu 3 bulan. Jadi, agar perkembangan-perkembangan bakterinya bisa terurai maka perlu penyesuaian dan beradaptasi, namanya makhluk hidup kan pasti ada adaptasi. Setelah adaptasi itu maka bakteri itu akan hidup terus, selanjutnya tinggal diberi pakan bekakatul dan pepeng.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Program ini dibangun dengan maksud atau bertujuan untuk harus dapat mengurai dan mengurangi tingkat pencemaran yang terjadi di Kampung Batik Laweyan. Program IPAL ini diresmikan dan mulai dijalankan sejak tahun 2007. Sehingga program IPAL ini sudah berjalan sekitar selama kurun waktu 5 tahun. Dilihat dari hal tersebut sebetulnya

program ini dapat dikatakan telah lama diterapkan disana, tetapi dalam kenyataan di lapangan walaupun program ini sudah berjalan cukup lama dalam mengurai air limbah yang ada disana (dari awal pembuatan IPAL sampai pada saat sekarang ini) kenyataannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa faktor diantaranya belum optimalnya penggunaan IPAL dan masih kurangnya fasilitasi pengadaan IPAL yang ada disana. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Kalau di lihat dari kasus yang ada sebenarnya masih perlu ada tambahan IPAL lagi, tetapi karena anggarannya tidak ada jadi mengoptimalkan mungkin penggunaan IPAL yang ada disana, tetapi apabila ada anggaran lebih baik kalau bisa di tambah lagi IPALnya. Untuk saat ini IPAL yang ada di sana sudah cukup membantu dalam mengurai limbah, ya walaupun hanya 40% sampai 70%, itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Kalau bahwa targetnya itu adalah pilot proyek dan diperuntukan untuk pengusaha batik 9 orang itu sudah sesuai, tetapi, harapan kami bahwa itu menjadi titik entry point agar supaya dibangun lagi IPAL-IPAL yang lain kelihatannya itu tidak terpenuhi. Karena nyatanya tidak ada IPAL yang dibangun setelah itu, sehingga kita kan berharap sebetulnya pengusaha-pengusaha disitu dikasih contoh mereka nanti membangun sendiri, mereplikasi itu, nyatanya tidak ada itu. Jadi dari sisi keinginan kami agar supaya nanti pengusaha lain ikut itu tidak tercapai, tetapi kalau hanya mengatakan apakah harapan kami setiap pengusaha membuang limbahnya itu tercapai sesuai dengan kapasitas IPAL itu, ya hanya 9 pengrajin itu.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Bapak arief juga menambahkan selaku pengurus FPKBL dan selaku salah satu pengusaha batik disana menyatakan bahwa :

“Ya hasilnya sudah sesuai dengan apa yang di harapkan tetapi kita hanya berharap kedepannya kapasitasnya di tambah, ntah kapasitasnya itu di jaga atau membuat IPAL-IPAL yang baru di tempat lainnya.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Dari para informan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator efesiensi dari program IPAL ini biaya yang dikeluarkan untuk membangun Program IPAL ini pemerintah setempat sama sekali tidak mengeluarkan biaya atau menggunakan APBD nya hal ini dikarenakan pembangunan IPAL ini merupakan hibah yang diberikan oleh pemerintah Jerman (GTZ) dengan melalui kerjasama pihak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam hal pembiayaan perwatan dari Program IPAL ini juga tidak terdapat banyak kendala yang dihadapi karena dalam melakukan perwatan program IPAL ini para pengusaha batik disana tidak banyak mngeuarkan biaya yang cukup besar dalam kurun waktu sebulanya. Selain dari itu juga perwatan yang mudah dalam merawat IPAL ini menambah nilai lebih karena dengan hal tersebut oleh karena perawatanya pun mudah sehingga biaya yang dikeluarkan pun tidak besar. Kinerja dari program ini memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan untuk menjadikan IPAL ini dapat bekerja secara optimal karena perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dari material-material yang dimasukan kedalam IPAL tersebut misalnya penyesuain dari Bakteri dan Lumpur tinja.

Dari semenjak awal pembuatan IPAL hingga sekarang ini belum 100% sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan dari 23 UKM

pengrajin batik yang ada disana hanya 9 pengrajin yang baru menggunakan sistem IPAL ini. Tetapi apabila dalam konteks bahwa target dari pembangunan IPAL ini disana hanya terdapat 9 pengusaha dan keseluruhan pengusaha tersebut menerapkan sistem IPAL maka dapat dikatakan bahwa program ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan masih perlunya penambahan IPAL disana agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal, bahkan apabila semua pengusaha bisa menerapkan sistem IPAL maka program ini akan dapat berjalan secara optimal dan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

3. Kecukupan

Indikator ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi

seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dengan adanya program IPAL di Kampung Batik Laweyan ini terdapat banyak manfaat yang ditimbulkan selain dari faktor tingkat angka pencemaran menjadi menurun. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Kalau manfaatnya itu banyak. Pertama kan mengurangi tingkat pencemaran, yang kedua itu secara aturan kita sudah melaksanakan kewajiban dengan memfasilitasi adanya IPAL. Lingkungan di selitar jadi lebih tertata, terjaga kelestariannya. Yang keempat image dari pembeli juga merasa senang karena sudah adanya IPAL, lingkungan disana menjadi lingkungan yang bersih, rapi dan indah. Jadi, dengan lingkungan yang di sana menjadi bersih menjadikan Kampung ini daya tarik bagi para wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Dari sudut pandang yang berbeda juga berpendapat mengenai manfaat yang ditimbulkan dari pengadaan IPAL ini yaitu bapak Arief selaku pengurus FPKBL dan sekaligus sebagai pengusaha Batik disana berpendapat terkait mengenai manfaat yang ditimbulkan dari adanya Program IPAL ini. Beliau mengungkapkan :

“Manfaat yang di timbulkan IPAL ini adalah yang tadinya air buat di gunakan sehari-hari tetangga itu kan terganggu akibat dari limbah batik ini sehingga sekarang sudah adanya IPAL kesehatan lingkungan sudah menjadi lebih baik dan bagi kami yang mendapatkan support dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan adanya IPAL tersebut isu-isu limbah satu paket dengan limbah industri itukan paling tidak sudah dapat di patahkan kalau dulu limbah industri otomatis hakikatnya mencemari tetangga, nah sekarang ini setelah adanya IPAL ini paling tidak sudah mengurangi tingkat pencemaran limbah di Kampung Batik Laweyan dan juga menjadi pembagi perbandingan dari tempat-tempat lain yang di mana belum menerapkan IPAL sehingga

keadaan lingkungan di tempat itu masih kurang di bandingkan di Kampung Batik Laweyan, selain itu juga di lihat dari pencitraan, sekarang ini Kampung Batik Laweyan jauh lebih baik dari sebelum menggunakan IPAL.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait manfaat yang ditimbulkan dari adanya program IPAL ini di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Manfaatnya, pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah di Kampung Batik Lewayan menjadi sangat berkurang. Selain itu baik pengusaha atau warga sini memiliki kesadaran bersama untuk lebih mencintai lingkungan sekitar, salah satunya dengan melakukan perawatan ipal ini secara berkala.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Pengadaan program IPAL yang ada di Kampung batik Laweyan selain menimbulkan berbagai manfaat yang ada seperti dari penjelasan di atas, adanya program IPAL ini juga berdampak pada adanya perubahan-perubahan yang muncul setelah adanya IPAL di Kampung Batik Laweyan. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Perubahan yang terjadi itu banyak, seperti seseorang yang tadinya tidak kepikiran untuk meneliti tentang IPAL disana sekarang meneliti. Perilaku masyarakat di sekitar sanapun berubah, mungkin yang tadinya hanya ngobrol-ngobrol bergosip tetapi sekarang sudah adanya IPAL jadi ada pembicaraan-pembicaraan yang terkait masalah kebersihan lingkungan. Para pengusaha juga jadi lebih menata pabriknya, agar terlihat rapi sehingga para pembeli akan senang saat berbelanja disana.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“Perubahannya itu paling tidak sebetulnya sudah ada kesadaran bahwa mereka harus memperhatikan aspek lingkungan barang kali yang bisa kami nilai plus bahwa masyarakat-masyarakat sekitar di Laweyan itu sudah lebih care terhadap lingkungannya karena mereka sadar bahwa lingkungan itu menjadi bagian dari citra prodak kalau ingin di pasarkan sehingga sebetulnya mereka menyadari bahwa IPAL itu perlu, tetapi persoalannya adalah kadang-kadang ini skala ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk membangun IPAL.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Bapak arief selaku pengurus FPKBL dan sekaligus salah satu pengusaha Batik disana juga mengungkapkan terkait masalah yang muncul setelah adanya IPAL di kampung batik Laweyan. Beliau mengungkapkan :

“Kalau secara fisik, air sumur yang dulunya ikut tercemar akibat limbah dari batik alhamdulillah sekarang menjadi bersih terus bagi kami Laweyan itu menjadi suatu rujukan bagi para pemilik sentra industri lainnya di kampung-kampung lain, mereka belajar ke Laweyan tentang IPAL untuk memberi inspirasi bagi daerah-daerah lain bahwa suatu sentra industri tidak harus mencemari lingkungan karena adanya solusi yaitu dengan menggunakan IPAL, meskipun tidak semerta-merta IPAL langsung di aplikasikan di tempat lain karena itukan mengikuti gravitasi, di tempat kami terdapat 2 tempat yang belum tercover oleh IPAL karena gravitasinya tidak memenuhi syarat karena tempatnya tersebut lebih rendah dari pembuangan akhir sehingga air tidak bisa di alirkan. (Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait perubahan yang muncul atau yang ditimbulkan dari adanya program IPAL ini di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Perubahannya kampung batik laweyan semakin terkenal dengan kampung yang ramah lingkungan, karena limbah pabrik yang dihasilkan pengusaha batik tidak dibuang begitu saja namun disaring terlebih dahulu dengan ipal. Masyarakat sini juga semakin memperhatikan lingkungan sekitar mas.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Dari para informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari indikator kecukupan ini terdapat adanya manfaat dan perubahan yang muncul setelah diadakanya program IPAL disana misalnya saja dilihat dari segi manfaat yang ditimbulkan. Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya pembangunan IPAL disana, selain dari berguna untuk mengurangi tingkat angka pencemaran limbah disana manfaat yang diperoleh pun bisa dalam segi masalah sosial misalnya saja mengundang image baik terhadap kampung batik laweyan baik dari para pengusaha dan masyarakat disekitar maupun dari para konsumen yang datang ke kampung batik laweyan tersebut. Selain itu dengan adanya IPAL ini membuat kampung batik Laweyan menjadi kampung batik yang bersih dan tertata dengan rapih oleh sebab itu pencitraan dari kampung batik Laweyan ini menjadi sangat baik.

Selain dari segi manfaat yang ditimbulkan, terdapat juga pengaruh perubahan yang muncul setelah adanya IPAL di kampung batik Laweyan misalnya saja kampung batik Laweyan sekarang ini sudah dijadikan tempat rujukan bagi kampung-kampung industri lain diberbagai tempat dan juga perubahan yang ditimbulkan dari IPAL ini pun berpengaruh terhadap pola pikir pengusaha dan masyarakat disekitar agar menjadikan pola pikir mereka menjadi pola pikir hidup bersih dan tidak individualisme.

4. Perataan

Indikator ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah yang akibat atau usahanya secara adil didistribusikan.

Pengadaan IPAL di Kampung Batik Laweyan pastinya banyak menimbulkan pengaruh baik dalam pengaruh internal maupun eksternalnya. Banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pengadaan IPAL disana misalnya saja pengaruh terhadap kelompok pengusaha dan masyarakat disekitar, dengan adanya program IPAL ini selain program tersebut memang diadakan dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pencemaran yang terjadi disana tetapi selain dari itu juga dengan adanya program ini berpengaruh juga terhadap hubungan sosial baik dari para sesama pengusaha, pengusaha dengan masyarakat sekitar maupun hubungan antara sesama masyarakat disana. Banyak hal positif yang dapat ditimbulkan dari pengadaan program IPAL ini misalnya saja sebelum adanya program ini masyarakat disana cenderung membahas atau mendiskusikan terkait suatu pembicaraan yang sekiranya kurang bermanfaat, tetapi setelah adanya program ini banyak terdapat aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang bertujuan untuk membangun kampung batik Laweyan ini ke arah yang lebih baik lagi.

Selain dari pada itu sebelum adanya program IPAL ini masyarakat disana cenderung masyarakat yang individualismenya tinggi sehingga pola

hubungan komunikasi antara hubungan masyarakat disana masih kurang, tetapi setelah adanya program IPAL ini masyarakat disana mendapatkan pembicaraan-pembicaraan yang baru yang bertujuan untuk membangun. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Yang jelas sekarang masyarakat disana jadi lebih sering bertemu, kalau dulu mungkin tidak ada yang di bicarakan, dulu hanya ngerumpi yang tidak berguna, pembicaraan mereka pun tidak berkembang. Dulu, frekuensi ngobrol antar warganya kurang sekarang dengan adanya IPAL ini jadi ada yang dapat di bicarakan antar warga atau pengusaha yang ada disana.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“meningkatkan kesadaran mereka untuk mengelola lingkungan mereka, tetapi kan sebetulnya bukan hanya itu kita kan berharap sebetulnya kalau itu seperti orang memberi kail itu lho supaya dia bisa mancing mendapatkan ikan lebih banyak, tetapi kan kenyatannya kan tidak adanya yang di bangun lagi (tidak bertambah). Dari sisi adanya peningkatan kesadaran iya, tetapi dari sisi harapan kita bahwa mereka akan membangun IPAL lebih mereplikasi itu tidak jalan.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Bapak Arif selaku pengurus FPKBL dan sekaligus sebagai salah satu pengusaha Batik disana juga menambahkan terkait pengaruh IPAL terhadap kelompok pengusaha dan masyarakat, beliau mengungkapkan :

“Pengaruh IPAL antara kelompok pengusaha dan masyarakat yaitu tadinya terjadi konflik-konflik horizontal antara produsen dan masyarakat sekitar itu kan jadi bisa diatasi dan itu memberikan semacam pencerahan bahwa ke depannya IPAL itu kan wajib dalam kaitannya dengan industri menjadi pencerahan bahwa kami

sudah memelopori IPAL itu memberikan pencerahannya sendiri”(Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program IPAL ini di Kampung Batik Laweyan khususnya pada masyarakat sekitar, beliau mengungkapkan :

“Masyarakat disini tentunya lebih peduli terhadap lingkungan setelah adanya IPAL ini. (Wawancara 24 Juni 2012)

Pengadaan program ini selain berpengaruh terhadap para pengusaha dan kelompok masyarakat, pengadaan program ini juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya terutama hambatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perilaku dari masyarakat di daerah sekitar itu sendiri. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si :

“hambatannya itu memang pertama itu tingkat kesadaran mereka itu rendah, yang kedua karena tingkat kesadaran mereka rendah, mereka itu cenderung tidak ingin membuang-buang uang mereka hanya untuk membangun IPAL. Sehingga ya itu tadi minta dibangun IPAL tetapi biayanya sakmura-murahnya kan susah.”(Wawancara 18 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Pada saat mau merencana bangun jadi memang itu pertama kali sulit untuk menyimpulkan perilaku dari masyarakat disana, karena pada saat itu masyarakat di Laweyan cenderung individualistik, tetapi setelah kemudian kita lokalisasi kita bimbing, kita fasilitasi mereka lebih terbuka. Tapi sekarang kita hambatannya

kalau kita mau membangun lagi kalau pendanaan dari APBD itu mungkin sulit, karena APBD itu yang diutamakan untuk masyarakat itu pada aspek kesehatan, pendidikan, orang miskin itu yang diutamakan dulu. Lingkungan hidup itu bagi pembangunan daerah itu termasuk yang prioritas belakang karena APBD lebih memprioritaskan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Jadi, karena masalah prioritas ini tidak mendesak sehingga dana APBD tidak memprioritaskan pembangunan ini.”(Wawancara 7 Juni 2012)

Bapak arief selaku pengurus FPKBL dan sekaligus salah satu pengusaha Batik disana juga mengungkapkan terkait hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program IPAL di kampung batik Laweyan. Beliau mengungkapkan :

“Hambatannya kalau secara teknis kalau daerah-daerah yang ketinggiannya tidak memenuhi syarat untuk di bangunkannya IPAL kalau pakai motor (pompa air) pun kan juga mahal yaa, selain itu hambatan lainnya ya jelas itu kalau pembuatan/pengadaan IPAL kan memerlukan pembiayaan yang cukup mahal jadi kalau tidak ada program bantuan dari pemerintah itu kan bisa dikatakan kami tidak mungkin bisa untuk membuatnya apalagi seperti kami ini hanya industri-industri menengah ke bawah sangat tidak mungkin untuk membuatnya sendiri.”(Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program IPAL ini di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Faktor pembangunan IPAL yang mahal jadi hambatannya mas, karena IPAL belum bisa dibangun di daerah lainnya. Padahal daerah lain juga berkeinginan untuk dibangun IPAL seperti disini. Ya kalau membangun IPAL swadana sendiri kan juga tidak mungkin mas, butuh peran serta pemerintah daerah, tapi kita juga tidak bisa terlalu banyak pada pemerintah karena mereka jugamemiliki keterbatasan dana.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Dari para informan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai indikator evaluasi terkait perataan dimana dalam pembahasan indikator ini membahas terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh pengadaan program IPAL terhadap suatu kelompok pengusaha dan masyarakat di Kampung Batik Laweyan. Pengaruh yang ditimbulkanya adalah adanya hubungan keakraban sosial yang terjalin lebih baik lagi antara pengusaha dengan sesama pengusaha, pengusaha dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat. Komunikasi sesama warga yang tinggal disana pun kian membaik. Selain dari pada itu dengan adanya IPAL sekarang ini tingkat kesadaran akan kebersihan lingkungan pun menjadi lebih tinggi, sekarang ini mereka saling bergotong royong dalam membangun Kampung Batik Laweyan menjadi Kampung yang bersih, rapih dan indah. Serta pengaruh lain yang ditimbulkan adalah pada Kampung Batik Laweyan ini sekarang menjadi rujukan bagi Kampung-kampung lain atau para pengusaha industri yang lain dalam mempelajari pengolahan limbah.

Dalam indikator ini juga membahas terkait hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program IPAL. Hambatan yang muncul disini diantaranya adalah masyarakat cenderung memiliki tingkat kesadaran akan menjaga kebersihan lingkunganya sangat rendah sehingga sewaktu membangun IPAL ini masyarakat tidak mau ikut campur atau tau menau terkait masalah IPAL. Selain itu terkait masalah pembangunan IPAL tidak semerta-merta membangun di sembarang tempat, dalam membangun IPAL perlu memperhatikan faktor ketinggian suatu daerah

karena apabila pembangunan IPAL dilakukan didaerah yang lebih rendah dari pembuangan akhir maka air tidak akan bisa dialiri ke pembuangan akhir karena tersendat oleh faktor ketinggian, walaupun bisa itu dengan menggunakan motor atau mesin penyedot yang otomatis itu bakal membuat biaya menjadi lebih besar lagi dan juga belum tentu menjadi lebih efektif.

5. Responsivitas

Indikator ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi

commit to user

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.dalam pengadaan program IPAL ini tentunya terdapat berbagai tanggapan yang beraneka ragam terkait masalah pengadaan program IPAL ini. Banyak tanggapan baik yang didapat terkait program ini tetapi tidak sedikit pula yang kurang baik dalam program IPAL yang ada disana. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Tanggapanya ya bagus saja, tapi ya itu, tanggapan mereka itu kadang-kadang orang-orang disana atau pengrajin itu susah, jadi mereka itu kalau di panggil rapat itu saja susah. jadi bagaimana ya, ibarat sudah dikasih bantuan tetapi datang buat rapat saja susah, jadi mereka tidak punya kesadaran. Tetapi dari sisi aksi mereka kadang-kadang malas karena kenapa itu terkait dengan upaya penegakkan hukum yang belum berjalan optimal, artinya “ngapain saya pusing-pusing, orang sepertinya saya sudah bisa jalan” tetapi kalau barangkali di push dengan upaya penegakkan hukum saya yakin tingkat kesadarannyapun makin tinggi.” (Wawancara 18 Juni 2012)

Hal yang sedikit berbeda dijelaskan Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Tanggapannya sekarang bagus sekali,bahkan mereka mengusulkan sendiri karena itu yang dimana disana terdapat baru satu IPAL mereka sekarang pada mengusulkan untuk meminta dibangun lagi IPAL, lha, ini perlu di fasilitasi. Kendalanya mas, pembangunan IPAL ini apabila di bangun di daerah yang lebih hilir di bandingkan ke pembuangan sungainya makanya tidak bisa mengalir.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Dari sisi pengusaha pun mendapatkan tanggapan yang baik terkait pengadaan program IPAL disana seperti di ungkapkan oleh Bapak Arif selaku pengurus FPKBL sekaligus juga salah satu pengusaha Batik disana mengungkapkan bahwa :

“Tanggapan dari kelompok pengusaha dan masyarakat sangat bagus dengan adanya IPAL itu kan kalau tidak ada persoalan teknis hampir semua pengusaha batik di Lweyan itu kan sudah ikut menggunakan IPAL permasalahan yang terjadi ya itu tingkat ketinggian yang berbeda2 sehingga tidak bisa menerapkan atau menggunakan IPAL.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait tanggapan masyarakat terhadap IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Dulu kami mengikuti sosialisasi terkait dengan adanya pembangunan ipal disini, ya setelah kami tahu tentang tujuan dari ipal ini mengurangi pencemaran, kami sangat respek dengan adanya program ipal tersebut.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Selain dari aspek tanggapan baik tanggapan para kelompok usaha ataupun masyarakat sekitar dalam pembahasan disini juga berbicara terkait masalah bagaimana kepatuhan mereka dalam pelaksanaan program IPAL ini. Dalam merealisasikan IPAL pada awalnya sangat sulit, dikarenakan tidak semua dari elemen pengusaha dan masyarakat mau menerima penerapan program ini, tetapi setelah program tersebut benar-benar terealisasikan banyak mendapatkan respon yang positif dan disambut baik oleh pengusaha dan masyarakat sekitar, serta pengusaha dan masyarakat disanapun ikut/patuh dengan prosedur ataupun ikut bersama-sama patuh

dalam menjaga, merawat dan melestarikan IPAL ini agar tetap terjaga dengan baik. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Surakarta Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa :

“Pertama kali itu di tolak, karena komunitas batik disana itu pemikirannya federal, yaa tidak hanya di Kampung Batik Laweyan saja mas, di Pekalongan, Indramayu yaa juga begitu, Cirebon juga sama, Rembang juga gitu. Tetapi setelah IPAL itu terealisasi banyak mendapatkan respon yang positif baik dari pengusaha batik maupun masyarakat sekitar.” (Wawancara 7 Juni 2012)

Sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Wijayani yaitu kepatuhan dalam pelaksanaan program ini lebih difokuskan pada pengusaha yang telah menerapkan sistem IPAL, jadi penekanan dalam aspek kepatuhan ini condong diwajibkan bagi para pengusaha batik yang dimana dalam mengolah limbahnya mereka sudah menggunakan IPAL tersebut. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si mengatakan :

“Jadi begini lho mas, jadi dari perencanaan sampai operasional itu mereka dilibatkan yang mengelola IPAL itu mereka, yang memelihara IPAL itu mereka gitu lho. Dan mereka menggunakan itu, tapikan IPALnya itu kan hanya khusus untuk 9 pengrajin, ya jadi manfaatnya untuk 9 pengrajin itu. Jadi IPAL itu tidak seperti selokan, semua orang boleh membuang air di selokan. IPAL itu memang sudah dirancang kalau hanya untuk 9 pengrajin yaa maka 9 pengrajin itu limbahnya yang mengalir ke IPAL, yang lainnya tidak bisa menuju ke IPAL. Meskipun mereka punya keinginan, tetapi persoalannya kapasitas kita memang hanya seperti itu, dan kepatuhannya mendapatkan respon baik dan mau ikut serta merawat dan menjaga IPAL nya itu” (Wawancara 18 Juni 2012).

Hampir sama halnya dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Arif, beliau adalah selaku pengurus FPKBL dan sekaligus Pula salah satu pengusaha Batik di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Kepatuhan masyarakat dalam hal ini, khususnya pengguna IPAL ini sudah cukup bagus, sukarela berpartisipasi dengan iuran tadi yang otomatis sangat murah tadi.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait kepatuhan masyarakat selama pelaksanaan program IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan, beliau mengungkapkan :

“Ya kalau dulu untuk sosialisasi kita selalu datang mas, terus untuk proses pembangunannya kita juga sangat mendukung, dan untuk perawatannya saat ini kita sering mengadakan kerja bakti setiap bulannya untuk membersihkan lingkungan di sekitar IPAL.” (Wawancara 24 Juni 2012)

Dari penjelasan diatas terkait masalah indikator responsivitas maka dalam hal ini juga perlu adanya evaluasi terkait program pelaksanaan IPAL yang ada kedepanya ataupun harapan-harapan baik dalam segi pemerintahnya selaku pelopor pengadaan IPAL, pengusahanya selaku orang yang menggunakan IPAL tersebut serta dari segi masyarakatnya dimana mereka merupakan orang yang mendapatkan efek baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan dan penggunaan program IPAL tersebut. Banyak hal yang masih perlu dikorekasi ataupun di evaluasi terkait masalah pengadaan IPAL ini dimana pengadaan disini memang bisa dikatakan cukup berhasil namun keberhasilan tersebut belum mencapai 100% berhasil.

Pengevaluasian IPAL bukan hanya pada aspek teknis saja tetapi juga pada aspek sosialnya. Dalam aspek teknis misalnya membuat IPAL dimana agar kinerjanya dapat bisa ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dalam mengolah limbahnya. Selain itu dalam masalah sosialnya pemerintah setidaknya bisa lebih mensosialisasikan kembali terkait manfaat adanya IPAL agar masyarakat dan pengusaha tidak menjadi salah persepsi, dimana tujuan dari itu agar membuat pengusaha maupun masyarakat menjadi sadar bahwa dengan adanya IPAL itu justru sangat bermanfaat serta hasil yang diperoleh justru untuk menguntungkan mereka. Seperti apa yang di utarakan oleh Kepala Sub bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surakarta, Bapak Ir. Bambang Wijayani, M.Si mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dievaluasi serta harapan untuk kedepannya bagi program IPAL ini adalah :

“Yang pertama perlu di evaluasi adalah dari segi teknologinya karena teknologi IPAL yang digunakan di Kampung Batik Laweyan ini merupakan teknologi paling sederhana dan paling murah. Mungkin kalau untuk di terapkan di UKM bukan untuk pabrik lho, dengan IPAL ini sudah cukup, kan biayanya murah, sehingga tidak perlu mikir-mikir banyak, yaa hanya perawatannya itu tadi mas, kan murah hanya modal bekatul, udah murah, juga bisa di pakai buat rame-rame kan mas. Untuk kondisi sekarang ini penggunaan IPAL yang ada disana sudah cukup, walaupun teknologinya masih kuno. Harapan saya, apabila penggunaan IPAL ini sudah secara keseluruhan digunakan untuk semua pengrajin disana mungkin perlu adanya kembali penambahan IPAL disana ataupun mengganti teknologi IPAL yang lebih modern daripada sekarang. Kemudian dari aspek komunitas yang ada disana, kepengurusan yang sudah terbentuk kalau bisa muncul anak dari kepengurusan yang sudah ada sehingga kepengurusan disana bisa lebih terpantau karena mengurus ruang lingkupnya menjadi lebih sempit karena sudah dibuatnya sub-sub kepengurusan. Serta

harapanya adalah perlu adanya direplikasikan kembali, trus kemudian dapat diperbanyak lagi.”(Wawancara 7 Juni 2012)

Sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Wijayani yaitu terkait masalah yang perlu di evaluasi dari pelaksanaan atau penerapan IPAL ini serta harapan kedepanya terkait pelaksanaan program ini. Kepala Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si berpendapat terkait masalah hal yang perlu di evaluasi terkait masalah program IPAL serta harapan kedepanya dari program ini. beliau berpendapat

“Undang-undang tetap menggariskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi untuk industri kecil untuk mengolah limbahnya sehingga harapan kami sebetulnya adalah ada upaya sinergis antara penegakkan hukum dan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan pencemaran. Kalau itu jalan saya yakin tingkat penyadaran itu bisa di efektifkan dalam bentuk langkah nyata “kan persoalannya kalau mereka dipanggil rapat saja tidak mau, itu bukan karena mereka tidak mempunyai kesadaran, mereka sebetulnya punya kesadaran tetapi kan persoalannya ngapain saya pusing-pusing wong yang seperti ini saja saya bisa jalan ko’ yang membuang limbahnya langsung ke sungai yaa tidak di apa-apain, yaa toh? Kan itukan hitung-hitungan ekonomi sebetulnya,nah kalau yang seperti ini bisa ngapain saya pusing-pusing, yaa toh?” (Wawancara 18 Juni 2012)

Dari sudut pandang yang berbeda juga menambahkan oleh Bapak Arief selaku pengurus Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan sekaligus pengusaha Batik disana mengenai pengevaluasian serta harapan kedepanya terkait dari pengadaan IPAL di laweyan. Beliau berpendapat bahwa :

“Kalau dilihat dari kemampuan masih kurang, masih perlu penambahan kapasitas untuk IPAL, IPAL-IPAL yang ada belum bisa mengcover seluruh limbah-limbah industri perlu adanya penambahan pembangunan IPAL, lebih baiknya lagi apabila setiap

suatu perusahaan, baik perusahaan industri ataupun perusahaan rumah tangga perlu adanya pembuatan IPAL tersendiri agar lebih efektif dalam mengurai pencemaran air limbahnya.” (Wawancara 3 Juli 2012)

Bapak Rohmadi selaku masyarakat sekitar dan juga orang yang merasakan efek/dampak dari IPAL disini juga memberikan pendapatnya terkait evaluasi IPAL kedepannya serta Harapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan kedepannya, beliau mengungkapkan :

“Evaluasinya cuma biaya pembangunan IPAL yang mahal, kalau ada teknologi pengurangan pencemaran air limbah yang lebih murah pembangunannya tentu itu mempermudah pengusaha batik lainnya untuk menerapkan teknologi pengurangan air limbah tersebut. Sedangkan Harapan saya ya kalau bisa IPAL tidak hanya dibangun disini saja, namun di daerah lain seperti di kampung batik laweyan barat dan timur juga bisa dibangun ipal seperti ini selain bisa mengurangi pencemaran masyarakat disanapun harapannya bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. (Wawancara 24 Juni 2012)

Dari para informan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas dari program IPAL, tanggapan kelompok pengusaha dan masyarakat terhadap program IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan ini secara keseluruhan sudah dapat dikatakan mempunyai tanggapan yang baik/positif dari mereka walaupun ada sedikit masalah atau terjadi kesalahpahaman pada awal/sebelum pembuatan IPAL berlangsung, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang jelas dan pasti dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah BLH kota Surakarta tetapi setelah terealisasinya program tersebut tanggapan positif berdatangan baik dari

para pengusahanya maupun dari masyarakat daerah sekitar Kampung Batik tersebut.

Pada aspek kepatuhan sudah cukup baik karena mereka ikut ambil peran dalam menjaga, merawat dan melestarikan IPAL, dan bagi sesama para pengusaha mereka bekerja sama dan bergotong royong dalam merawat dan menjaga IPAL agar IPAL tetap bekerja dengan baik. Selain itu dengan membayar iuran tepat waktu dari para pengusahanya hal tersebut juga merupakan suatu bentuk kepatuhan yang baik. Dari hal-hal diatas maka dapat di evaluasikan terkait penggunaan dan penerapan IPAL kedepanya, diharapkan pengadaan IPAL selanjutnya baik penambahan IPAL di Kampung Batik Laweyan ataupun pengadaan IPAL-IPAL selanjutnya di tempat lain diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar hasilnya lebih baik dibandingkan IPAL yang ada di Kampung Batik Laweyan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Evaluasi Implementasi Program IPAL Di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang mempengaruhinya. Untuk melihat Evaluasi Implementasi Program IPAL di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta secara lebih menyeluruh dapat dilihat dari beberapa kriteria atau indikator berikut ini :

1. Efektivitas

Program IPAL ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan tetapi belum 100% karena belum semuanya perusahaan batik disana sudah menerapkan sistem IPAL. Kondisi air sungai yang melewati kampung batik Laweyan belum dapat terkontrol pencemaran limbahnya sebab bukan hanya dari masyarakat setempat yang mencemari sungai tetapi dari daerah-daerah hulu yang terlebih dahulu mencemari sungai sehingga kampung batik Laweyan belum sepenuhnya terwujud menjadi daerah yang bersih, sehat, rapih dan indah.

2. Efisiensi

Program IPAL ini tidak terdapat banyak kendala yang dihadapi karena dalam melakukan perawatan program IPAL ini para pengusaha batik disana tidak banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam kurun waktu sebulanya. Walaupun kinerja dari program IPAL ini belum 100% sesuai

dengan apa yang diharapkan dikarenakan program ini baru hanya diterapkan pada 11 UKM saja padahal disana terdapat 23 UKM batik yang aktif tetapi hal tersebut setidaknya sudah sangat membantu dalam mengurangi tingkat pencemaran disana.

3. Kecukupan

Manfaat yang diperoleh dari adanya pembangunan IPAL ini, selain berguna untuk mengurangi tingkat angka pencemaran limbah manfaat lain yang diperoleh adalah dengan adanya IPAL ini membuat kampung batik Laweyan menjadi kampung batik yang bersih dan tertata dengan rapih oleh sebab itu pencitraan dari kampung batik Laweyan ini menjadi sangat baik. Selain itu perubahan yang terjadi adalah kampung batik Laweyan sekarang ini sudah dijadikan tempat rujukan bagi kampung-kampung industri lain diberbagai tempat untuk dipelajari tentang manajemen IPALnya.

4. Perataan

Program ini banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan. Salah satu Pengaruh yang ditimbulkannya adalah adanya hubungan keakraban sosial yang terjalin lebih baik lagi antara pengusaha dengan sesama pengusaha, pengusaha dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat. Selain dari pengaruh yang ditimbulkan dalam program ini juga terdapat hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan IPAL tersebut. Hambatan yang muncul disini diantaranya adalah masyarakat disana cenderung memiliki tingkat kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungannya sangat rendah sehingga sewaktu membangun IPAL ini

masyarakat tidak mau ikut campur atau tau menau terkait masalah IPAL. Selain itu dalam proses pembuatan IPAL ini harus tidak boleh dibuat pada sembarang tempat, harus memperhatikan ketinggian lokasi sehingga air bisa mengalir pada pembuangan akhir.

5. Responsivitas

Program IPAL ini secara keseluruhan sudah dapat dikatakan mempunyai tanggapan yang baik/positif dari mereka walaupun ada sedikit masalah atau terjadi kesalahpahaman pada awal/sebelum pembuatan IPAL ini berlangsung. Pada aspek kepatuhannya pun sudah cukup baik dimana mereka ikut ambil peran dalam menjaga, merawat dan melestarikan IPAL ini, dan bagi sesama para pengusaha mereka bekerja sama dan bergotong royong dalam merawat dan menjaga IPAL ini agar supaya IPAL ini tetap bekerja dengan baik.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini bukan berarti tidak terdapat ruang-ruang perbaikan. Oleh karena itu penelitian dengan tema yang serupa diharapkan dapat dilakukan lagi dengan lebih baik oleh peneliti lain di waktu mendatang dikarenakan masih banyaknya kekurangan dari penelitian ini sehingga di waktu mendatang peneliti lain dapat lebih menyempurnakan lagi menjadi sebuah penelitian yang baik dan dapat lebih bisa dipahami oleh pembaca. Selain itu masih minimnya penelitian terkait penelitian ini khususnya Pada Jurusan Ilmu Administrasi juga dapat menambah referensi yang lain dan berbeda terkait penelitian mengenai “Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan

Air Limbah) khususnya pada Kawasan industri Kampung Batik Laweyan. Dari temuan penelitian, dapat diketahui adanya kelemahan yang dimiliki oleh Dinas dan juga hambatan yang terjadi di luar Dinas yang dapat mengganggu jalannya evaluasi implementasi program IPAL di kawasan industri kampung batik Laweyan, maka ada beberapa saran dalam evaluasi terkait masalah ini :

1. Bagi Pemerintah (Badan Lingkungan Hidup) Kota Surakarta agar perlu adanya penambahan IPA, karena pengadaan IPAL disana baru bisa diterapkan atau digunakan oleh 11 UKM saja, sehingga kedepannya diharapkan bisa ditambahkan lagi bahkan apabila menginginkan hasil yang baik menyediakan 1 IPAL untuk 1 perusahaan batik
2. Lebih meningkatkan lagi kualitas material baik material bahan pembuatan IPAL ataupun bahan pengurai agar hasil yang di dapat bisa lebih maksimal dari kondisi sekarang ini yang hanya baru mencapai 70-80% nya saja.
3. Pemerintah perlu melakukan adanya sosialisasi-sosialisasi terkait pentingnya penggunaan IPAL bagi perusahaan-perusahaan penghasil limbah industri dimana tujuannya dengan adanya sosialisasi tersebut perusahaan ataupun industri rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan sehingga dengan itu mereka mau untuk membuat IPAL dimana dampak yang dirasakan menjadikan daerahnya menjadi daerah yang bersih, rapih, sehat dan indah.
4. Bagi masyarakat sekitar kawasan industri kampung batik Laweyan untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam hal memelihara, merawat

dan menjaga program IPAL (Intalasi Pengolahan Air Limbah) agar program tersebut dapat selalu berjalan dengan baik dan dapat bertahan lama untuk terus digunakan.

5. Bagi pengusaha batik di kawasan industri kampung batik Laweyan diharapkan dapat lebih optimal lagi dalam mengelola limbahnya agar dapat terkelola dengan baik sehingga dapat mempertahankan pencitraan kawasan kampung batik Laweyan ysng merupakan daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah.

